

PBB: Junta Myanmar tak Henti Tingkatkan Kekerasan

NEW YORK (IM)- Utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan, Selasa (26/10), junta Myanmar sebagai pemerintah negara itu tidak akan berhenti meningkatkan kekerasan. Dia memperingatkan langkah seperti itu akan mendorong Naypyidaw menuju ketidakstabilan dan menjadi negara gagal.

“Saya berharap komunitas internasional tidak akan menyerah. Kita harus berdiri bersama rakyat,” kata Schraner Burgener yang menyelesaikan jabatannya akhir pekan ini setelah lebih dari tiga tahun.

Protes dan kerusuhan telah melumpuhkan Myanmar sejak kudeta 1 Februari. Militer dituduh melakukan kekejaman dan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil, meskipun junta menyalahkan kerusuhan pada trois yang bersekutu dengan pemerintah bayangan.

Schraner Burgener pekan lalu mengatakan bahwa Myanmar telah mengalami perang saudara dan kesempatan untuk kembali ke demokrasi menghilang. Dia menilai militer tidak tertarik dalam kompromi atau dialog. “Kekerasan tidak akan berhenti jika seseorang menerima SAC sebagai pemerintahan yang sah, kekerasan tidak akan berhenti,” kata Schraner Burgener, merujuk pada Dewan Administrasi Negara (SAC), sebutan junta Myanmar.

Diplomat dari Swiss mengatakan, perlunya dialog nyata dan jujur di antara semua pihak. Namun, agar itu terjadi, pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing pertama-tama perlu digantikan oleh seseorang yang lebih konstruktif. Para pemimpin Asia Tenggara akan bertemu pekan ini, tanpa Min Aung Hlaing. “Tidak ada seorang pun di kawasan ini yang tertarik untuk mengakui SAC karena itu berarti menuju negara gagal, ketidakstabilan, tidak hanya di Myanmar, tetapi juga di kawasan itu,” kata Schraner Burgener.

PBB juga dihadapkan dengan klaim saingan tentang siapa yang akan duduk di kursi Myanmar di badan dunia itu. Sebuah keputusan oleh negara-negara anggota digambarkan Schraner Burgener sebagai langkah penting dalam menentukan akhir tahun ini. **tom**



KUDETA MILITER DI SUDAN

Barikade jalan dibakar saat berlangsungnya apa yang disebut informasi kementerian sebagai kudeta militer di Khartoum, Sudan, Senin (25/10).

Kudeta Militer Sudan, 7 Orang Tewas dan 140 Terluka

Saat ini negara-negara di dunia telah memprotes aksi militer untuk kudeta Sudan.

KAIRO (IM)

Setidaknya 7 orang tewas dan 140 orang terluka setelah militer menembaki massa yang berunjuk rasa menentang kudeta Sudan. Para pengunjuk rasa turun ke jalan setelah militer membubarkan pemerintahan sipil, menanggapi para pemimpin politik dan menyerukan keadaan darurat pada Senin (25/10).

Pasukan militer dilaporkan pergi dari rumah ke rumah di ibu kota Khartoum untuk menangkap para provokator lokal yang menggerakkan unjuk rasa.

Saat ini negara-negara di dunia telah memprotes aksi militer untuk kudeta Sudan. Menurut laporan BBC pada Selasa (26/10), AS menahan dana bantuan sebesar 700 juta dolar AS sebagai bentuk pro-

tes kudeta Sudan.

Pemimpin kudeta Sudan, Gen Abdel Fattah Burhan, membenarkan tindakan militer dengan menyalahkan konflik politik pemerintahan sipil yang dianggap sudah merugikan negara.

Para pemimpin sipil dan pihak militer telah berselisih sejak penguasa lama Omar al-Bashir digulingkan pada 2 tahun lalu.

Saat malam tiba pada Senin (25/10), sejumlah besar pengunjuk rasa berada di jalan-jalan Khartoum dan kota-kota lain, menuntut kembalinya pemerintahan sipil, kata reporter BBC Arab Mohamed Osman melaporkan dari ibu kota.

Salah satu demonstran yang terluka mengatakan kepada BBC bahwa kakinya tertembak oleh tentara di luar markas besar militer.

Demonstrasi lainnya mengatakan bahwa militer menembakkan granat kejut, kemudian menghujani massa dengan peluru tajam.

“Dua orang meninggal, saya melihat mereka dengan mata kepala sendiri,” kata Al-Tayeb Mohamed Ahmed, salah satu pengunjuk rasa.

Serikat dokter Sudan dan kementerian informasi juga menulis di Facebook bahwa penembakan fatal terjadi di luar kompleks militer.

Sejumlah gambar beredar menunjukkan keadaan rumah sakit di ibu kota Khartoum Sudan yang menunjukkan orang-orang terluka dan pakaannya berlumuran darah.

Sejauh ini BBC melaporkan bahwa aksi protes belum akan mereda, meski sudah banyak korban dari aksi kekerasan karena bentrokan antara pihak sipil dan militer Sudan.

Kudeta Sudan telah memicu pengunjuk rasa memblokir jalan dengan tumpukan batu bata dan membakar ban.

Banyak wanita juga ambil bagian dalam unjuk rasa dan meneriakkan “tolak aturan militer”.

Bandara kota ditutup dan penerbangan internasional ditangguhkan. Internet dan sebagian besar saluran telepon juga mati.

Staf Bank Sentral Sudan dilaporkan melakukan pemogokan kerja, dan para dokter di seluruh negeri menolak bekerja di rumah sakit yang dikelola militer, kecuali dalam keadaan darurat.

Sementara itu, Uni Eropa mengancam penarikan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok beserta anggota kabinet lainnya dan mendesak agar mereka segera dibebaskan setelah panglima militer membubarkan pemerintahan transisi.

“Kami mendesak pasukan keamanan untuk segera melepaskan orang-orang yang ditangkep secara tidak sah,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell melalui pernyataan.

Permintaan serupa disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia mengecam upaya kudeta di Sudan dan meminta agar perdana menteri Sudan dan anggota sipil pemerintah segera dibebaskan.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) mengentikan bantuan dana darurat ke Sudan setelah militer melakukan kudeta. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan, Washington akan mengevaluasi seluruh hubungannya dengan Khartoum kecuali negara itu kembali ke jalur transisi menuju demokrasi.

“Amerika Serikat menghentikan bantuan senilai 700 juta dolar AS dalam alokasi bantuan dana darurat untuk mendukung ekonomi Sudan, dana itu dimaksudkan untuk mendukung transisi demokrasi negara tersebut, dan kami mengevaluasi langkah selanjutnya untuk program Sudan,” kata Price, dilansir Aljazeera, Selasa (26/10). **tom**

AS Keluarkan Aturan Baru Vaksin Bagi Pelaku Perjalanan Asing

JAKARTA (IM) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Selasa (26/10) menekankan aturan baru tentang vaksin bagi pelaku perjalanan udara internasional. Pemerintah AS juga mencabut pembatasan ketat bagi perjalanan asal Tiongkok, India dan sebagian besar negara Eropa.

Kedua kebijakan itu akan diberlakukan mulai 8 November, kata Gedung Putih. “Adalah kepentingan Amerika Serikat untuk menghapus pembatasan negara-negara yang sebelumnya diterapkan selama pandemi covid-19 dan untuk mengadopsi kebijakan perjalanan udara yang sebagian besar bergantung pada vaksinasi guna memulihkan perjalanan udara internasional secara aman ke Amerika Serikat,” kata Biden dalam pernyataannya.

Gedung Putih mengkonfirmasi bahwa anak-anak di bawah 18 tahun dan orang dengan gangguan kesehatan tertentu dikecualikan dari persyaratan baru vaksin tersebut. Pelaku perjalanan non-wisata dari sekitar 50 negara dengan tingkat vaksinasi kurang dari 10 persen juga akan diberikan pengecualian.

Negara-negara itu di antaranya adalah Mesir, Aljazair, Armenia, Myanmar, Irak, Nikaragua, Senegal, Uganda, Libya, Ethiopia, Zambia, Kongo, Kenya, Yaman, Haiti, Chad dan Madagaskar. Mereka harus dikecualikan secara umum harus menjalani vaksinasi dalam 60 hari sejak tiba di AS. Pembatasan perjalanan yang luar biasa ketat pertama kali diberlakukan AS pada awal 2020 untuk mencegah penyebaran Covid-19. Aturan itu melarang masuk sebagian besar warga asing yang dalam dua pekan terakhir tinggal di Inggris, 26 negara Schengen di Eropa tanpa aturan perbatasan, Irlandia, Tiongkok, India, Afrika Selatan, Iran, dan Brazil.

Pemerintah AS mengungkapkan pada 20 September bahwa mereka akan menghapus pembatasan bagi pelaku perjalanan dari 33 negara yang sudah divaksin lengkap pada awal November. “Keluarga dan handai tolan bisa saling bertemu lagi, wisatawan dapat mengunjungi tempat-tempat kami yang menakutkan. Kebijakan ini akan semakin mendorong pemulihan ekonomi,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.

Pemerintahan Biden juga merinci syarat-syarat bagi maskapai untuk memastikan pelaku perjalanan asing telah divaksin sebelum menaiki pesawat menuju

AS. Satu hal yang dikhawatirkan maskapai penerbangan adalah memastikan pelaku perjalanan asing memahami aturan baru tersebut hanya dalam dua pekan sebelum diberlakukan. Pejabat AS juga khawatir waktu sesingkat itu tak cukup untuk memberi pemahaman pada orang-orang Amerika yang belum divaksin bahwa mereka akan menghadapi aturan testing yang lebih ketat.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) pada Senin merilis aturan baru penelusuran kontak yang mengharuskan maskapai mengumpulkan informasi dari penumpang internasional. Data penunjang seperti nomor telepon, email dan alamat di AS harus dicatat dan disimpan selama 30 hari jika sewaktu-waktu diperlukan untuk menelusuri pelaku perjalanan yang telah terpapar varian Covid-19 atau penyakit lainnya.

CDC sebelumnya mengatakan akan membolehkan vaksin apapun yang disetujui penggunaannya oleh regulator AS atau Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan vaksin dosis campuran yang diterima pelaku perjalanan. Badan Keamanan Transportasi AS berencana mengeluarkan perintah keamanan yang memberi dasar hukum bagi maskapai untuk menerapkan aturan vaksin tersebut.

Formulir pengesahan penunjang menyatakan bahwa berbongol tentang status vaksinasi merupakan tindak kriminal. CDC mengatakan tak ada pengecualian agama bagi pelaku perjalanan internasional yang ingin menghindari aturan pembatasan Covid-19.

Mereka harus menyerahkan dokumen vaksinasi dari sumber pemerintah dan maskapai harus mengonfirmasi dosis terakhir yang mereka terima minimal pada dua pekan sebelum keberangkatan. Mereka juga harus menunjukkan hasil negatif tes Covid-19 yang dilakukan maksimal tiga hari sebelumnya.

Gedung Putih mengatakan warga AS yang belum divaksinasi dan warga asing yang mendapat pengecualian akan diwajibkan menunjukkan hasil negatif test Covid-19 yang dilakukan maksimal sehari sebelumnya. Pemerintah AS akan merilis rincian aturan baru itu pekan ini bersamaan dengan rencana pencabutan pembatasan di perbatasan darat pada 8 November bagi warga asing yang sudah divaksin. **gul**

Gembong Narkoba Prancis Sofiane Hambli Ditangkap di Rumah Sakit Maroko

RABAT (IM) - Gembong narkoba Prancis Sofiane Hambli ditangkap kembali di satu rumah sakit Maroko saat dia dirawat karena luka wajah yang serius. Hambli melewati kewajiban pembatasan bersyarat pada Maret tahun ini. Laporan itu diungkapkan sumber keamanan kepada AFP, Selasa (26/10).

Sofiane Hambli yang berusia 46 tahun merupakan keturunan Perancis-Aljazair. “Dia menggunakan surat-surat palsu untuk pemeriksaan dirinya ke rumah sakit setelah menderit luka sepanjang 20 sentimeter akibat serangan dengan parang atau pedang di Tangier,” ungkap sumber keamanan tersebut.

“Begitu dia pulih, kami akan pergi menjemputnya,” papar salah satu sumber kepada AFP, membenarkan informasi yang pertama kali diungkapkan majalah L’Obs.

Berasal dari kota Mulhouse di Prancis timur, Hambli dianggap sebagai salah satu importir ganja terbesar di Prancis. Dia memiliki catatan kriminal yang panjang, serta sejarah melarikan diri dari penahanan. Pria yang dikenal sebagai Chimera itu masuk dalam surat perintah penangkapan internasional tahun ini setelah melewati jaminan pembatasan bersyarat Maret lalu di Prancis, karena dituduh mengatur impor empat ton ganja. Surat kabar Parisien melapor-

kan pada saat itu, “Dia menghasilkan USD2,8 juta dari transaksi tersebut, tetapi tidak pernah mengirimkan obat-obatan tersebut kepada pembelinya yang diduga ingin membalas dendam.”

Hambli membantah tuduhan itu. Dia juga diketahui pernah menjadi informan polisi antinarkotika Prancis dan terlibat dalam impor tujuh ton ganja dalam operasi 2015 yang dipantau pihak berwenang. Salah satu rekannya, Moufide Bouchibi, warga Prancis-Aljazair berusia 41 tahun yang kadang-kadang disebut “raja hash” dijatuhi hukuman 16 tahun penjara di Prancis bulan lalu karena kasus narkoba. **ans**

Presiden Mesir Akhiri Status Keadaan Darurat

KAIRO (IM)-Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi akan mencabut status keadaan darurat untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Mesir memberlakukan keadaan darurat pada April 2017, setelah pengeboman mematikan di gereja-gereja.

Sejak insiden pengeboman itu, Mesir secara rutin memperpanjang status keadaan darurat pada interval tiga bulan. Mesir tetap mempertahankan status keadaan darurat selama beberapa tahun, meskipun situasi keamanan membaik. “Mesir telah menjadi sebuah oasis keamanan dan sta-

bilitas di kawasan. Oleh karena itu untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya membatalkan perpanjangan keadaan darurat di semua wilayah negara,” ujar Sisi.

Keadaan darurat memberikan wewenang kepada pihak berwenang untuk melakukan penangkapan, dan menindak musuh negara. Pemerintahan Sisi memberlakukan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, dan telah membungkam kritik liberal selama beberapa tahun terakhir.

Aktivis Mesir terkemuka Hossam Baghat menyambut baik keputusan pemerintah

untuk mengakhiri keadaan darurat. Dia mengatakan, pencabutan keadaan darurat akan menghentikan penggunaan pengadilan keamanan negara darurat. Namun hal itu tidak akan berlaku untuk beberapa kasus profil tinggi yang sudah dirujuk ke pengadilan tersebut.

Pasukan keamanan Mesir telah memerangi pemberontakan oleh gerilyawan terkait dengan ISIS di Sinai utara. Namun belum lama ini, para pejuang ISIS telah mengkonsolidasikan posisi mereka di daerah tersebut. **tom**



LETUSAN GUNUNG BERAPI CUMBRE VIEJA DI SPANYOL

Gunung berapi Cumbre Vieja terus meletus, seperti terlihat di El Paso, Pulau Canary La Palma, Spanyol, Senin (25/10).



KASUS PENEMBAKAN DI PUSAT PERBELANJAAN DI IDAHO - AS Aparat keamanan mengumpulkan barang bukti dekat lokasi penembakan di pusat perbelanjaan Boise Towne Square di Boise, Idaho, Amerika Serikat, Senin (25/10).

Mohammad bin Salman Kucurkan Rp147 Triliun untuk Perangi Perubahan Iklim

RIYADH (IM) - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman meluncurkan Inisiatif Hijau Timur Tengah (MGI) di Riyadh pada Selasa (26/10). Dia mengumumkan dua inisiatif dengan biaya USD10,4 miliar (Rp147 triliun) untuk memerangi perubahan iklim. Dalam inisiatif itu, Arab Saudi akan berkontribusi sekitar 15% dari seluruh biaya.

Membuka konferensi tingkat tinggi (KTT) MGI, Putra Mahkota mengatakan pertemuan itu juga berencana menempatkan peta jalan regional untuk memerangi perubahan iklim.

“Kita berkumpul hari ini di KTT ini untuk menggabungkan kekuatan dan mengkoordinasikan upaya kita melindungi lingkungan, menghadapi perubahan iklim, dan mengembangkan peta jalan menuju pengurangan emisi karbon di kawasan ini dengan lebih dari 10% kontribusi global, dan menanam 50 miliar pohon di kawasan ini, sebagai program penanaman pohon terbesar secara global, ini akan berkontribusi untuk mencapai 5% dari target global untuk penghijauan,” ungkap Putra Mahkota.

Putra Mahkota juga mengatakan bahwa Kerajaan akan membentuk dana investasi untuk solusi ekonomi karbon di wilayah tersebut, dan inisiatif global yang berkontribusi pada solusi bahan bakar bersih untuk memberi makan lebih dari 750 juta orang di seluruh dunia. Dia menambahkan, “Kerajaan akan membangun program

regional untuk mengurangi emisi karbon dalam kerangka Inisiatif Timur Tengah Hijau, dan membuat platform kerja sama untuk menerapkan konsep ekonomi karbon sirkular.” “Ada kesenjangan dalam sistem aksi iklim regional. Dan melalui koordinasi upaya regional dan berbagi pengalaman dan teknologi, kita dapat mempercepat pencapaian dalam inisiatif kita,” ujar

“Untuk memungkinkan ini, Kerajaan mengumumkan akan membentuk Platform Koperasi untuk mengimplementasikan konsep Carbon Economy (CCE), membangun pusat regional untuk perubahan iklim, mengembangkan pusat regional untuk Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon (CCUS), pusat regional untuk peringatan dini badan; pusat regional untuk pengembangan perikanan berkelanjutan; dan program penyemaian awan regional,” papar dia.

Dia menjelaskan, “Pusat dan program ini akan memainkan peran utama dalam membangun infrastruktur yang diperlukan untuk melindungi lingkungan, mengurangi emisi dan meningkatkan tingkat koordinasi regional.” Para kepala negara dari seluruh dunia ambil bagian dalam KTT MGI, termasuk Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan Putra Mahkota Yordania Hussein bin Abdullah II. John Kerry, Utusan Khusus pertama Amerika Serikat untuk Iklim, juga hadir dalam acara yang mendapat sorotan dunia tersebut. **tom**